

# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

## LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS TAHUN 2025





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
Alamat Jalan Pattimura No.32, Wamena

Telp : -

Email : papuapegunungan@kpu.go.id

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU INTERNAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu secara internal Laporan Kinerja instansi Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan untuk Tahun Anggaran 2025 oleh tim evaluasi internal sesuai Pedoman Revius atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Papua Pegunungan,



  
Agus Filma

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Hukum Evaluasi**

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
7. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan KPU.

### **B. Latar Belakang**

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), KPU Provinsi Papua Pegunungan memegang tanggung jawab besar dalam meletakkan fondasi demokrasi yang akuntabel dan transparan. Tahun 2025 dimana merupakan periode krusial pasca-pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak, di mana evaluasi terhadap penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja menjadi parameter utama profesionalisme penyelenggara pemilu.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2026 dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana hibah maupun APBN telah dikelola dengan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis di kinerja tahun 2025. Mengingat tantangan geografis dan sosiopolitik yang unik di wilayah Papua Pegunungan, akuntabilitas bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif, melainkan bukti nyata legitimasi lembaga dalam menjalankan mandat konstitusi. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan telah melakukan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan sebagai satuan kerja pada Tahun 2025 dengan nilai 72 (tujuh puluh dua) dari 100 (seratus) atau dengan predikat BB. Berkaitan dengan hal

tersebut guna lebih mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan menuju peningkatan kualitas pembangunan budayakerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan laporan evaluasi ini dimaksudkan untuk memberikan penilaian objektif atas kinerja KPU Provinsi Papua Pegunungan selama tahun anggaran 2025. Adapun tujuannya adalah:

1. Memastikan program kerja di sekretariat KPU Provinsi sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) KPU RI;
2. Menilai sejauh mana anggaran pendidikan pemilih dan sosialisasi berdampak pada partisipasi masyarakat di 8 kabupaten cakupan;
3. Memastikan pertanggungjawaban keuangan negara dilakukan secara akurat, terutama terkait logistik dan operasional di medan sulit;
4. Memberikan masukan bagi perbaikan tata kelola SDM dan sarana prasarana sebagai instansi yang baru berkembang.

### **D. Ruang Lingkup Evaluasi**

Evaluasi akuntabilitas kinerja ini mencakup analisis mendalam terhadap:

1. Ketepatan penetapan target kinerja di tingkat Provinsi dan koordinasi dengan KPU Kabupaten;
2. Validitas data capaian tahapan pemilu/pemilihan dan indeks kepuasan pemangku kepentingan;
3. Kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang informatif dan bebas dari salah saji material;
4. Efektivitas fungsi pengawasan oleh inspektorat dan mekanisme kontrol internal di lingkungan sekretariat;
5. Evaluasi terhadap penyelesaian sengketa, distribusi logistik, dan pengelolaan data pemilih berkelanjutan di wilayah pegunungan tengah.

### **E. Metode Evaluasi**

Metode evaluasi dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memastikan objektivitas penilaian kinerja. Proses evaluasi mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

## 1. Kerangka Kerja Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan lima komponen utama manajemen kinerja dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja (30%): Menilai kualitas Renstra, RKT, dan Perjanjian Kinerja (PK).
- Pengukuran Kinerja (25%): Menilai keandalan indikator dan mekanisme pengumpulan data.
- Pelaporan Kinerja (15%): Menilai penyajian informasi dalam LAKIP.
- Evaluasi Internal (10%): Menilai efektivitas audit kinerja oleh APIP/SPI.
- Capaian Kinerja (20%): Menilai realisasi fisik dan dampak (outcome) program.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, tim evaluator menggunakan teknik sebagai berikut:

- Penelaahan terhadap dokumen anggaran (DIPA), Laporan Keuangan, Laporan Kinerja (LKj), dan aplikasi sistem informasi kinerja (E-Rekap/SITAB).
- Melakukan tinjauan langsung ke KPU Kabupaten di wilayah Papua Pegunungan untuk memverifikasi keberadaan fisik logistik dan sarana prasarana.
- Diskusi mendalam dengan komisioner dan sekretariat KPU terkait kendala operasional di wilayah pegunungan tengah.
- Mengukur indeks kepuasan masyarakat dan peserta pemilu terhadap layanan administrasi KPU.

## 3. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan:

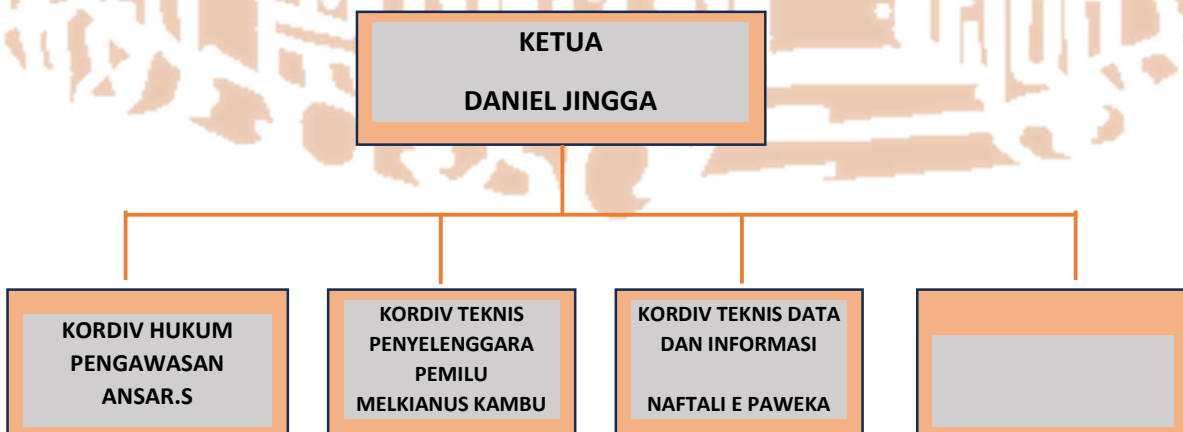
- Analisis Varians: Membandingkan antara target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi aktual.
- Analisis Efisiensi: Mengukur rasio antara penggunaan anggaran dengan capaian output, terutama pada pos biaya logistik yang memiliki indeks kemahalan tinggi.
- Analisis Kausalitas: Mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara kendala geografis/keamanan dengan keterlambatan pencapaian target tertentu.

#### 4. Alur Prosedur Evaluasi

- Persiapan: Pembentukan tim evaluasi dan penyusunan instrumen penilaian.
- Pelaksanaan: Pengumpulan bukti-bukti (eviden) kinerja tahun 2026.
- Analisis & Verifikasi: Validasi data antara laporan pusat dengan kondisi di delapan kabupaten.
- Penyusunan LHP: Perumusan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat skor akuntabilitas dan rekomendasi perbaikan.

#### F. Gambaran Umum Evaluasi

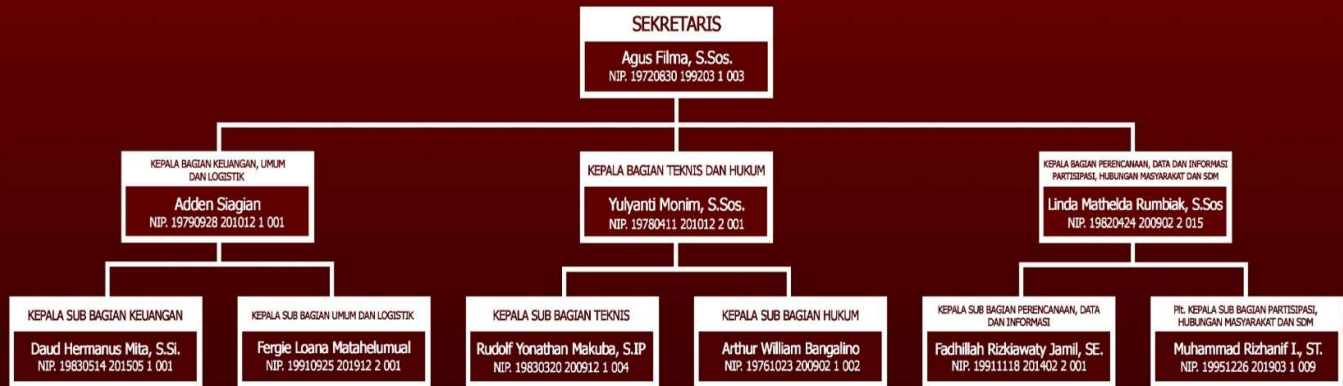
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Pegunungan mempunyai tugas mendukung dan memfasilitasi Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilu, yaitu membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Papua Pegunungan; membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum; membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal, dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan dalam hal administrasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

## STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN



## G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi internal. Pada tahun 2025 memperoleh nilai 72 ( Tujuh puluh Dua) dengan kategori BB. Penilaian tersebut menunjukkan system dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja dengan beberapa perbaikan.

### AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Nomor : **SP DIPA- 076.01.2.670902/2025** alokasi anggaran Sekretariat KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 mengalami beberapa kali perubahan/revisi, dan anggaran KPU dalam DIPA yang semula Rp 7.831.237.000 ( Tujuh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah ),

Namun setelah dilaksanakan revisi sebanyak 13 kali sesuai kebutuhan kegiatan di KPU sehingga DIPA per Desember 2025 dengan revisi terakhir adalah sebesar Rp Rp. 16.413.444.000 (Enam Belas Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :

⊕

**Tabel 1.14**

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	Rp <u>5.116.771.000,-</u>	Rp <u>4.932.924.979,-</u>	Rp <u>183.846.021,-</u>	96,41
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 11.089.945.000,-	Rp <u>11.062.619.337,-</u>	Rp <u>27.325.663,-</u>	99,75
3	Belanja Modal	Rp 206.728.000,-	Rp 201.441.400,-	Rp 5.286.600	97,44
	JUMLAH	Rp 16,413,444,000	Rp <u>16,196,985,716,-</u>	Rp 215,458,284	98,69

□

## BAB II HASIL EVALUASI

Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan dalam hal ini KPU Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 sebagai mana table berikut:

No	Catatan
<b>Perencanaan Kinerja</b>	
1	Bukti dokumen berupa BA Pleno Kegiatan dan Time Line kegiatan masih belum merepresentasikan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya
<b>Pengukuran Kinerja</b>	
2	IKU Belum menjelaskan teknik atau cara perhitungan dan sumber data untuk mengukur indikator kinerja
3	Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian aktifitas
<b>Pelaporan Kinerja</b>	
4	Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target Jangka menengah (Renstra)
5	Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
6	Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.
7	Laporan kinerja belum menginformasikan hambatan dalam merealisasikan kinerja dan upaya mengatasi hambatan tersebut
<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</b>	
8	Belum ditindaklanjuti seluruhnya catatan rekomendasi pada hasil evaluasi SAKIP 2023 (baru hanya sebagian)

### **BAB III PENUTUP**

A. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan berupaya antara lain :

1. Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja dengan memenuhi kriteria SMART. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan program atau sasaran;
2. Menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dengan mengacu pada sasaran kinerja dalam dokumen Renstra;
3. Melakukan Reviu pada Renstra;
4. Menyusun IKU pada Renstra yang mendukung sasaran/tujuan;
5. Menyusun Dokumen RKT dengan indikator dan target sesuai dengan kategori (SMART) sebagai dasar pengajuan anggaran tahunan;
6. Mengukur realisasi IKU dan Indikator Kinerja Sasaran serta dijadikan acuan untuk mengukur kinerja yang disajikan pada LAKIP;
7. Melakukan reviu pada IKU;
8. Menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antar realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi sampai dengan target jangka menengah dan perbandingan lain yang diperlukan pada SAKIP;
9. Menggunakan Informasi yang andal dalam LAKIP untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja secara menyeluruh;
10. Melaksanakan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan di tahun berikutnya dari hasil evaluasi program/akuntabilitas kinerja.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Papua Pegunungan,

